

TESIS

**HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN MAJELIS
KEHORMATAN NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS**

Oleh :

AGUNG ADHITIA LINGGA

NIM : 1520123076



Pembimbing

- 1. Dr. Suharizal., S.H., M.H**
- 2. Neneng Oktarina., S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

(Agung Adithia Lingga, 1520123076, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2018)

Abstrak

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu: 1. Bagaimanakah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2. Bagaimana perbandingan Dewan Kehormatan Notaris didalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 3. Bagaimana mendesign harmonisasi Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris untuk mewujudkan pengawasan notaris yang lebih baik. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Diundangkannya UU Perubahan UUN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris. Mengenai pasal 66 ayat (3 dan 4) juga pasal 66 A, terkait kewenangan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris walau keduanya di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangatlah berbeda tugas dan kewenangnya. Perbedaan Dewan Kehormatan Notaris pada UUN 30/2004 dan 2/2014 adalah Wewenang Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan Notaris ini hanya bersifat internal organisasi saja. Ada lima design dalam harmonisasi MKN dengan Dewan Kehormatan yaitu: a) Mendesign Fungsi Pengawasan vs Fungsi Pembinaan; b) Mendesign Kewenangan Preventif dan Reaktif Kuratif; c) Mendesign Kewenangan Pembinaan; d) Memperbaiki dan Melengkapi Database Notaris dan e) Eliminasi Potensi Pertambahan Jumlah Notaris Bermasalah Hukum.

Kata Kunci : Harmonis, Pengaturan, Kewenangan,

HARMONIZATION ARRANGEMENT OF AUTHORITY OF HONORARY ASSEMBLY NOTARIS AND HONORARY COUNTS NOTARI

(Agung Adithia Lingga, 1520123076, Master of Notary, Faculty of Law,
University of Andalas, 2018)

Abstract

There are two institutions authorized to supervise the notary public, namely the Notary Public Honor Council established by the minister and the Honorary Council which is one of the tools of notary organization, in this case the Indonesian Notary Association. Both institutions have the authority to supervise a notary up to impose sanctions on a notary who is found to have committed a violation of the prevailing provisions. There are differences in authority between the two institutions because they are formed from different institutions, but both still can not be separated from the existence of notary organizations. The problems studied in this writing are: 1. What is the authority of the Notary Public Council in Law Number 2 Year 2014 Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary's Office. 2. How to compare the Board of Honor Notary in Law Number 30 Year 2004 About Position Notary and Law Number 2 Year 2014 Amendment to Law Number 30 Year 2004 About Position Notary. 3. How to design the harmonization of Honorary Council of Notary and Honorary Board Notary to realize better notary supervision. In this research, the method used is descriptive normative juridical where the data are sourced from the primary and secondary data obtained based on document studies that are analyzed qualitatively. The enactment of the Law on Amendment of UUJN, the provisions stipulated in the Law have been valid and binding, especially for the Notary. Regarding article 66 paragraphs (3 and 4) as well as article 66 A, related to the authority and the Establishment of the Notary Publicity Council, the Notary Publicity Council and the Notary Supervisory Council, although both under the Ministry of Law and Human Rights, are very different from their duties and authorities. The difference between the Notary's Board of Honor at UUJN 30/2004 and 2/2014 is the Honor Board's Authority for violations of the organizational ethical code whose impact is not directly related to the public or in other words the authority of the Notary's Board of Honor is only internal organization only. There are five designs in the harmonization of MKN with the Council of Honor namely: a) Designing Function Supervision vs. Function of Coaching; b) Designing Preventive and Reactive Curative Authorities; c) Designing the Authority of Coaching; d) Fixing and Completing Notary Database and e) Elimination of Additional Potential Number of Notary.

Keywords: Harmony, Arrangement, Authority